

**PERAN BAWASLU DALAM EDUKASI PENGAWASAN PEMILU BAGI PEMILIH PEMULA DI
KECAMATAN RATU SAMBAN PADA PILKADA SERENTAK TAHUN 2024**

Oleh:

Taj Muhammad Ramadhani¹⁾, Heru Purnawan²⁾, Edi Darmawi³⁾

¹²³Program Studi Administrasi Publik FISIPOL Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH Bengkulu Indonesia

Informasi Artikel

Tulisan dikirim

Tanggal 02-10-2025

Tulisan direvisi

Tanggal 22-10-2025

Tulisa diterima

Kembali tanggal 13-11-2025

Korespondensi penulis

Email : tajm4595@gmail.com

Kontak Seluler:

Abstract

This study aims to analyze the role of the General Election Supervisory Agency (Bawaslu) in educating first-time voters on election oversight in Ratu Samban District during the 2024 Simultaneous Regional Elections. First-time voters are a strategic demographic in a democratic system, yet they face various challenges, such as low political literacy, dependence on social media, and vulnerability to money politics. In this context, Bawaslu is expected to act not only as an election supervisor but also as a political educator. This research employs a descriptive qualitative approach, utilizing interviews, observations, and documentation for data collection. Informants include Bawaslu members, representatives from the General Election Commission (KPU), first-time voters, and community leaders. The findings reveal that Bawaslu in Bengkulu City fulfills three key roles: as a regulator by establishing supervision guidelines, as a dynamizer by encouraging youth participation through educational activities, and as a facilitator by providing access to information and political learning. Educational strategies include formal, non-formal, and informal approaches, supported by social media engagement and partnerships with educational institutions. In conclusion, Bawaslu's role in political education for first-time voters is significant but still requires stronger and more adaptive communication strategies tailored to the youth. This study recommends enhancing inter-institutional collaboration, improving Bawaslu's human resource capacity, and leveraging digital platforms to effectively reach young voters.

Keywords: Bawaslu, Political Education, Election Oversight, First-Time Voters, 2024 Regional Elections.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam edukasi pengawasan pemilu terhadap pemilih pemula di Kecamatan Ratu Samban pada Pilkada Serentak Tahun 2024. Pemilih pemula menjadi kelompok strategis dalam demokrasi, namun masih menghadapi berbagai tantangan seperti rendahnya literasi politik, dominasi informasi dari media sosial, dan kerentanan terhadap politik uang. Dalam konteks ini, Bawaslu diharapkan tidak hanya berfungsi sebagai pengawas, tetapi juga sebagai agen edukasi politik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri dari anggota Bawaslu, perwakilan KPU, pemilih pemula, dan tokoh masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bawaslu Kota Bengkulu telah menjalankan tiga fungsi utama, yaitu sebagai regulator yang menetapkan pedoman pengawasan, sebagai dinamisor yang menggerakkan partisipasi pemilih pemula melalui kegiatan edukatif, dan sebagai fasilitator yang menyediakan akses informasi serta sarana pembelajaran politik. Strategi edukasi yang diterapkan mencakup pendekatan formal, non-formal, dan informal dengan memanfaatkan media sosial dan kerjasama dengan lembaga pendidikan. Kesimpulannya, peran Bawaslu dalam edukasi pengawasan pemilu cukup signifikan namun masih memerlukan penguatan strategi komunikasi yang lebih adaptif terhadap karakteristik pemilih pemula. Rekomendasi penelitian ini menekankan pentingnya sinergi antar lembaga, peningkatan kapasitas SDM Bawaslu, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam menjangkau pemilih muda secara efektif.

Kata Kunci: Peran Bawaslu, Edukasi Politik, Pengawasan Pemilu, Pemilih Pemula, Pilkada 2024.

Pendahuluan

Pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada) serentak tahun 2024 merupakan salah satu tonggak penting dalam perjalanan demokrasi Indonesia. Sebagai bentuk konsolidasi sistem pemerintahan yang demokratis, Pemilukada serentak bertujuan untuk memperkuat stabilitas politik di daerah, serta mempercepat pembangunan yang merata. Dalam konteks ini, Pemilukada bukan hanya sekadar ajang pergantian kepemimpinan, melainkan juga momentum strategis bagi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam menentukan arah kebijakan di tingkat lokal. Indonesia, sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia setelah India dan Amerika Serikat, terus berkomitmen dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan pemilu melalui berbagai pembaruan sistem dan regulasi. Transparansi, keadilan, serta partisipasi publik menjadi prinsip utama yang dijunjung tinggi demi mewujudkan pemilu yang bermartabat dan berkualitas (Rosanti 2020).

Salah satu aspek krusial dalam pelaksanaan pemilu adalah tingkat partisipasi masyarakat. Keikutsertaan pemilih, khususnya pemilih pemula, menjadi indikator penting dalam menilai keberhasilan pemilu. Pemilih pemula adalah kelompok yang baru pertama kali mendapatkan hak pilih, umumnya berusia 17 hingga 21 tahun, dan jumlahnya tidak dapat diabaikan. Berdasarkan data Komisi Pemilihan Umum (KPU), jumlah pemilih pemula pada Pemilu 2024 diperkirakan mencapai sekitar 60 juta jiwa, atau sekitar 30% dari total pemilih secara nasional (Ausath 2024).

Penelitian ini bertumpu pada sejumlah asumsi yang menjadi dasar dalam mengkaji peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam edukasi pengawasan pemilu bagi pemilih pemula pada Pilkada Serentak Tahun 2024 di Kecamatan Ratu Samban, Kota Bengkulu. Asumsi pertama adalah peran Bawaslu dalam menjangkau pemilih pemula sangat dipengaruhi oleh pendekatan

sosialisasi yang digunakan, partisipasi masyarakat, serta regulasi dan kebijakan yang diterapkan dalam pelaksanaan pengawasan. Kedua bahwa Bawaslu memiliki tanggung jawab strategis dalam memastikan proses pemilu yang berlangsung secara jujur, adil, dan demokratis melalui edukasi khususnya kepada kelompok pemilih pemula., tingkat partisipasi dan kesadaran politik pemilih pemula dapat menjadi cerminan dari keberhasilan program edukasi pengawasan yang dijalankan oleh Bawaslu. Berdasarkan asumsi-asumsi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi peran dan strategi edukasi Bawaslu dalam mengoptimalkan pengawasan politik terhadap pemilih pemula di Kecamatan Ratu Samban.

Urgensi dari penelitian ini terletak pada pentingnya peran Bawaslu sebagai garda terdepan dalam menjaga integritas pemilu melalui pengawasan dan edukasi terhadap pemilih pemula. Kajian mengenai peran Bawaslu dalam pengawasan pemilu memang sudah banyak dilakukan, namun penelitian yang spesifik membahas efektivitas peran edukatif Bawaslu terhadap pemilih pemula di tingkat kecamatan masih sangat terbatas. Penelitian ini bertujuan untuk mengisi kekosongan tersebut sekaligus memberi rekomendasi konkret bagi penguatan fungsi Bawaslu di masa mendatang, terutama dalam hal strategi komunikasi politik kepada generasi muda.

Penelitian bertujuan ini ialah Menganalisis peran Bawaslu dalam edukasi pengawasan pemilu bagi pemilih pemula pada Pilkada Serentak Tahun 2024 di Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu dan Mengidentifikasi strategi edukasi pengawasan pemilu oleh Bawaslu terhadap pemilih pemula di Kecamatan Ratu Samban.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif (Sugiyono, D. 2018), yaitu metode yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Bengkulu dalam mengedukasi dan mengawasi pemilih pemula di Kecamatan Ratu Samban pada Pilkada Serentak Tahun 2024. Pendekatan ini dipilih karena peneliti ingin mengungkap secara menyeluruh proses, strategi, serta tantangan yang dihadapi Bawaslu dalam meningkatkan partisipasi politik pemilih pemula melalui pendekatan edukatif dan pengawasan partisipatif

Hasil dan Pembahasan

A. Peran Bawaslu Regulator, Dinamisator, Fasilitator (Yusuf, M.2014)

1. Bawaslu sebagai regulator

Fungsi regulator melekat secara yuridis pada Bawaslu sebagai lembaga pengawas pemilu yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dalam pelaksanaannya, Bawaslu Kota Bengkulu secara aktif melakukan pengawasan terhadap seluruh tahapan Pilkada, termasuk kampanye, distribusi logistik, hingga pemungutan suara.

Pada konteks pemilih pemula, peran regulator diwujudkan melalui pelibatan dalam pengawasan partisipatif. Bawaslu telah menyusun SOP (Standard Operating Procedure) dalam edukasi mengenai larangan kampanye di luar jadwal, politik uang, penyebaran hoaks, dan manipulasi data pemilih. Kegiatan pengawasan dilakukan dengan menjangkau SMA dan komunitas mahasiswa, seperti pelaksanaan simulasi pengawasan dan

pembentukan "Satuan Tugas Pemantau Muda." Dengan pendekatan ini, pemilih pemula tidak hanya diposisikan sebagai objek edukasi, tetapi juga sebagai subjek pengawasan demokrasi.

Sebagai regulator, Bawaslu memang tidak memiliki kewenangan langsung dalam menyusun undang-undang, namun memiliki otoritas untuk memberikan masukan dan rekomendasi kepada lembaga pembentuk regulasi dan penyelenggara pemilu lainnya, seperti KPU dan DPR.

"Kami tidak membuat undang-undang, tapi kami punya ruang untuk memberikan masukan terhadap kebijakan teknis pemilu, termasuk bagaimana kelompok rentan seperti pemilih pemula bisa dilibatkan secara lebih optimal." (Hasil wawancara bersama ketua bawaslu kota Bengkulu di kantor bawaslu kota Bengkulu)

Bawaslu Kota Bengkulu menyusun pedoman teknis yang bersifat strategis, seperti materi sosialisasi untuk pemilih pemula yang menyoroti isu-isu penting seperti politik uang, penyebaran hoaks, dan pentingnya menjadi pemilih yang rasional. Pedoman ini digunakan dalam kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan secara langsung maupun melalui media daring.

2. Bawaslu sebagai dinamisator

Sebagai dinamisator, Bawaslu berperan menggerakkan partisipasi aktif pemilih pemula. Hal ini direalisasikan melalui berbagai kegiatan inovatif dan komunikatif. Misalnya, lomba desain poster anti politik uang, pentas seni bertema demokrasi, dan diskusi terbuka bertajuk "Ngobrol Santai Soal Pemilu". Bawaslu

memanfaatkan kanal-kanal komunikasi yang akrab dengan pemilih pemula seperti Instagram Live, TikTok, dan YouTube.

Data lapangan menunjukkan bahwa pendekatan yang komunikatif dan berbasis minat generasi muda mampu meningkatkan daya tarik dan kesadaran politik pemilih pemula. Hal ini sejalan dengan teori komunikasi partisipatif, di mana efektivitas pesan dipengaruhi oleh media dan konteks sosial budaya target audiens. Pemilih pemula yang sebelumnya apatis menjadi lebih aktif mengikuti informasi pemilihan dan terlibat dalam kegiatan yang diselenggarakan Bawaslu.

Sebagai dinamisor, Bawaslu aktif menciptakan dinamika positif dalam lingkungan pemilihan pemula. Program seperti Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) menjadi medium pelatihan intensif yang menyasar generasi muda untuk menjadi pengawas partisipatif dan agen perubahan di komunitasnya.

"Kami tidak hanya menyampaikan materi, tapi juga mendorong mereka untuk aktif. Misalnya dalam SKPP, peserta kita ajak menganalisis potensi pelanggaran dan berdiskusi langsung dengan praktisi pemilu."(hasil wawancara bersama kordiv di kantor bawaslu kota bengkulu)

Kegiatan lain seperti lomba video edukasi politik, podcast pemilihan, dan diskusi publik di kampus menjadi metode interaktif yang disukai oleh kalangan muda. Namun demikian, tantangan tetap ada. Apatisme politik, keterbatasan akses ke sekolah tertentu, serta perbedaan minat menjadi hambatan yang perlu

diatasi melalui pendekatan kreatif dan komunikatif.

3. Bawaslu sebagai Fasilitator

Dalam kapasitas sebagai fasilitator, Bawaslu menyediakan akses dan sumber belajar pemilihan. Hal ini diwujudkan melalui:

- 1.Penyusunan dan distribusi modul edukasi digital yang dapat diakses melalui platform pembelajaran daring;
- 2.Pembentukan kelompok belajar politik pemula di sekolah dan kampus;
- 3.Layanan konsultasi daring melalui kanal media sosial resmi Bawaslu.

Peran fasilitator menempatkan Bawaslu sebagai mitra dalam proses pembelajaran politik, yang tidak bersifat satu arah. Pemilih pemula diberi ruang untuk berdiskusi, bertanya, bahkan menyampaikan aspirasi tentang sistem pemilu. Praktik ini mendekatkan nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan sehari-hari generasi muda, sekaligus memperkuat literasi politik mereka.

Dalam fungsinya sebagai fasilitator, Bawaslu menyediakan ruang dan sarana untuk mendukung literasi politik pemilihan pemula. "Pojok Pengawasan" di kantor Bawaslu dan kanal media sosial menjadi sarana terbuka untuk publik belajar tentang pengawasan pemilu.

"Kami pernah kedatangan tim dari Bawaslu ke sekolah. Mereka membawa modul, video pendek, dan diskusi interaktif. Anak-anak jadi tahu bahwa mereka punya peran penting sebagai pemilih, walau baru pertama kali."(Hasil wawancara bersama pemilih pemula di rumah)

Selain itu, Bawaslu juga bekerja sama dengan institusi pendidikan dan organisasi pemuda melalui nota kesepahaman untuk penyebaran materi kepemiluan secara berkelanjutan. Bentuk fasilitasi ini dinilai mampu menjembatani informasi antara penyelenggara dan pemilih muda secara langsung dan efektif.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa peran Bawaslu dalam mengedukasi dan mengawasi pemilih pemula tidak hanya berjalan secara formal dan prosedural, tetapi juga adaptif dan partisipatif. Peran sebagai regulator berfokus pada penegakan hukum, peran dinamisator mendorong mobilisasi kesadaran politik, dan peran fasilitator memungkinkan akses dan kolaborasi lintas lembaga serta masyarakat.

Secara konseptual, ketiga peran ini telah dijalankan secara sinergis dan mendapat pengakuan dari berbagai pihak, baik dari lembaga mitra, peserta kegiatan, maupun tokoh masyarakat. Hal ini menjadi indikator bahwa pendekatan Bawaslu dalam mendampingi pemilih pemula telah memenuhi aspek edukatif, partisipatif, dan kolaboratif, meskipun tentu tetap memerlukan penguatan dalam cakupan dan intensitas program di masa mendatang.

B. Strategi Edukasi Politik Formal, Non-Formal, Informal Coombs, P. H., & Ahmed, M. 1974)

Strategi edukasi politik oleh Bawaslu dilakukan melalui tiga pendekatan utama: formal, non-formal, dan informal. Pendekatan ini menunjukkan sinergi antara struktur kelembagaan dengan kebutuhan partisipasi yang dinamis di kalangan pemilih pemula. Bentuk Edukasi Politik

Bawaslu terhadap Pemilih Pemula Merujuk pada tipologi pendidikan politik oleh Coombs dan Ahmed (1974), bentuk edukasi politik oleh Bawaslu dapat diklasifikasikan sebagai berikut.

1. Edukasi Politik Formal

Edukasi formal dilaksanakan melalui kerja sama dengan institusi pendidikan. Bawaslu menyusun kurikulum tambahan bertema kepemiluan yang disisipkan dalam pelajaran. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi keterbatasan pada aspek durasi pembelajaran dan kelengkapan materi. Perlu adanya revisi materi agar lebih kontekstual dan aplikatif sesuai dengan realitas Pilkada.

Strategi formal mencakup kegiatan di lembaga pendidikan melalui seminar, kuliah umum, dan simulasi pengawasan pemilu. Meski tidak masuk dalam kurikulum resmi, kehadiran Bawaslu dalam ruang formal menjadi penting dalam membentuk pemahaman dasar tentang demokrasi dan partisipasi politik.

"Saya pernah ikut seminar Bawaslu di SMA Itu sangat membuka wawasan saya tentang apa yang boleh dan tidak boleh dalam kampanye. Tapi saya rasa kegiatan ini masih kurang sering dilakukan."(Hasil wawancara bersama pemilih pemula)

Pembelajaran formal ini memiliki keterbatasan, terutama karena metode penyampaian yang masih satu arah. Untuk mengatasi hal tersebut, Bawaslu mengombinasikan pendekatan formal dengan simulasi dan dialog

interaktif agar siswa dan mahasiswa lebih terlibat aktif.

2. Edukasi Politik Non-Formal

Bentuk ini dinilai paling efektif dalam meningkatkan pemahaman pemilih pemula. Bawaslu melaksanakan pelatihan, seminar, simulasi pemilu bersama Salah Satu Sma di ratu samban yaitu Sma 2 kota bengkulu. Kegiatan tersebut mengedepankan pendekatan praktis dan dialogis, di mana peserta terlibat langsung dalam skenario pemilu. Edukasi non-formal mempermudah internalisasi nilai-nilai demokrasi melalui pengalaman langsung.

Pendekatan non-formal melalui pelatihan, workshop, dan kegiatan berbasis komunitas lebih fleksibel dan mendalam. Pelatihan ini tidak hanya memberi pengetahuan, tetapi juga membangun kemampuan teknis dan kepemimpinan.

"Kami diajak kerja sama dengan Bawaslu dalam menyelenggarakan pelatihan pengawasan partisipatif. Anak-anak muda dari berbagai komunitas ikut, dan setelah itu mereka bisa menyampaikan informasi kepada teman-temannya."(Hasil wawancara bersama tokoh masyarakat kepa;a adat)

Namun, pendekatan ini menghadapi kendala berupa keterlibatan yang cenderung hanya berasal dari kelompok yang sudah aktif secara sosial-politik. Oleh karena itu, Bawaslu dituntut untuk memperluas jangkauan dan menjaring pemuda yang belum tersentuh oleh kegiatan semacam ini.

3. Edukasi Politik Informal

Edukasi informal dijalankan dengan optimalisasi media sosial. Konten edukatif dikemas dalam bentuk video kreatif, meme, infografik, dan kuis online. Meskipun jangkauannya luas, tantangan utama adalah memastikan persebaran informasi yang merata serta verifikasi terhadap akun yang mengatasnamakan Bawaslu. Untuk itu, strategi kolaborasi dengan influencer lokal dan komunitas digital menjadi penting.

Pendekatan informal dinilai paling efektif menjangkau pemilih pemula karena menggunakan platform yang akrab bagi mereka. Bawaslu Kota Bengkulu memanfaatkan Instagram, TikTok, dan YouTube sebagai media utama dengan menyajikan konten ringan namun edukatif

"Saya tahu informasi dari akun Instagram Bawaslu. Mereka bikin kontennya lucu dan gampang dipahami. Kadang ada kuis dan giveaway juga, jadi menarik."(Hasil wawancara bersama pemilih pemula)

Pendekatan ini terbukti mampu menjangkau pemilih muda yang pasif dalam kegiatan formal dan non-formal. Bawaslu juga menggandeng influencer lokal sebagai role model dalam menyampaikan pesan demokrasi, memperkuat keterhubungan antara institusi dan anak muda.

Dari hasil wawancara menunjukkan bahwa Bawaslu telah mengimplementasikan strategi edukasi politik secara holistik, mencakup pendekatan formal, non-formal, dan informal. Masing-masing pendekatan memiliki keunggulan dan menjangkau

segmen yang berbeda-beda dari kalangan pemilih pemula.

a)Edukasi formal berperan sebagai dasar pengenalan dan legitimasi edukasi kepemiluan dalam institusi pendidikan.

b)Edukasi non-formal mendorong pemahaman dan keterlibatan langsung dalam isu-isu kepemiluan melalui interaksi tatap muka dan kegiatan berbasis komunitas.

c)Edukasi informal menyasar gaya hidup digital pemilih muda dengan konten yang ringan, visual, dan kontekstual.

Seluruh informan mengonfirmasi efektivitas pendekatan ini, baik dari sisi penyelenggara, penerima manfaat, maupun mitra kelembagaan. Dengan menggabungkan ketiga pendekatan ini secara sinergis, Bawaslu mampu memperluas jangkauan edukasi, memperkuat literasi politik pemilih pemula, serta menumbuhkan kesadaran kritis terhadap nilai demokrasi dan pemilu yang berintegritas.

Temuan ini menggarisbawahi bahwa tantangan utama Bawaslu bukan pada kualitas konten edukasi, melainkan pada aspek distribusi, kontinuitas, dan keberlanjutan program. Keterbatasan SDM, waktu, serta jangkauan wilayah menjadi hambatan nyata dalam menjamin setiap pemilih pemula mendapatkan hak yang setara atas informasi dan pendidikan politik. Dengan perencanaan yang lebih sistematis, pelibatan multipihak, serta inovasi dalam metode penyampaian (termasuk digitalisasi dan pelatihan kader lokal), tantangan ini dapat diatasi. Ke depannya, Bawaslu perlu memperkuat posisi sebagai agen literasi demokrasi

yang hadir secara adil dan berkelanjutan, bukan hanya menjelang pesta demokrasi, tetapi juga sebagai bagian dari pembangunan kesadaran politik jangka panjang

PEMBAHASAN

A. Peran Bawaslu dalam Pilkada Serentak Tahun 2024

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) merupakan lembaga negara yang memiliki mandat strategis dalam sistem demokrasi elektoral Indonesia. Dalam konteks Pilkada Serentak Tahun 2024, peran Bawaslu menjadi semakin penting mengingat kompleksitas proses pemilu yang melibatkan berbagai aktor, kepentingan politik, dan dinamika sosial di tingkat lokal hingga nasional. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Bawaslu bertanggung jawab dalam melakukan pengawasan terhadap seluruh tahapan pemilu, termasuk tahapan persiapan, pelaksanaan, hingga pasca-pemilu. Tugas pengawasan ini mencakup pengawasan terhadap pelaksanaan prinsip-prinsip pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (LUBER dan JURDIL). Lebih dari sekadar pengawasan teknis administratif, Bawaslu juga memiliki peran substantif dalam memastikan bahwa setiap warga negara, terutama kelompok rentan seperti pemilih pemula, dapat menggunakan hak pilihnya secara bebas dari tekanan, intimidasi, dan manipulasi politik.

Dalam kerangka teori kelembagaan demokrasi yang dikemukakan oleh Diamond dan Morlino (2005), keberadaan lembaga pengawas pemilu seperti Bawaslu merupakan elemen kunci dalam memperkuat integritas demokrasi. Mereka menyatakan bahwa demokrasi

tidak hanya membutuhkan prosedur elektoral yang kompetitif, tetapi juga lembaga yang mampu menjamin akuntabilitas dan transparansi proses. Oleh karena itu, Bawaslu tidak hanya sebagai institusi pelengkap dalam penyelenggaraan pemilu, tetapi merupakan instrumen penting dalam membentuk demokrasi substansial yang berorientasi pada kualitas. Peran Bawaslu bahkan dapat dianggap sebagai elemen penentu dalam menegakkan demokrasi prosedural menjadi demokrasi yang partisipatif dan inklusif. Dalam proses ini, Bawaslu harus mampu mengidentifikasi titik-titik rawan pelanggaran, menyusun strategi pencegahan, serta mendorong akuntabilitas seluruh aktor pemilu.

B. Strategi Edukasi Politik Bawaslu terhadap Pemilih Pemula

Dalam menjalankan mandatnya, Bawaslu tidak hanya berperan sebagai pengawas pelanggaran administratif dan pidana pemilu, tetapi juga sebagai agen perubahan sosial-politik melalui kegiatan edukasi politik. Pemilih pemula menjadi salah satu sasaran prioritas dalam strategi ini karena mereka belum memiliki pengalaman dalam menggunakan hak pilih, namun memiliki potensi besar dalam jangka panjang untuk menjadi pemilih rasional dan kritis. Kelompok ini seringkali rentan terhadap manipulasi informasi, politik uang, dan mobilisasi identitas, sehingga perlu mendapatkan pembekalan yang memadai mengenai nilai-nilai demokrasi dan proses kepemiluan. Strategi edukasi yang dikembangkan Bawaslu meliputi pendekatan formal dan informal. Pendekatan formal dilakukan melalui kerja sama dengan institusi pendidikan seperti sekolah dan perguruan tinggi melalui program "Bawaslu Goes to School", pelatihan kepemiluan, diskusi

kelompok terfokus, dan simulasi pemilu.

Sementara pendekatan informal memanfaatkan media sosial, platform digital, dan forum komunitas lokal yang menjangkau anak muda secara lebih fleksibel dan adaptif. Teori komunikasi politik McQuail (2010) menyatakan bahwa efektivitas penyampaian pesan politik sangat ditentukan oleh kecocokan antara media, konten, dan karakteristik audiens. Dalam konteks pemilih pemula yang cenderung digital-native, maka pemanfaatan konten visual, narasi inspiratif, dan kampanye digital menjadi instrumen efektif dalam membentuk literasi politik mereka. Studi oleh Raharjo (2021) mendukung pandangan ini, di mana ditemukan bahwa partisipasi pemilih pemula meningkat secara signifikan setelah mereka mengikuti pelatihan dan simulasi pemilu yang difasilitasi oleh Bawaslu. Ini menunjukkan bahwa strategi edukasi yang interaktif dan berbasis pengalaman langsung lebih mampu menciptakan pemilih yang sadar akan pentingnya hak suara dan tanggung jawab sebagai warga negara dalam sistem demokrasi.

Lebih lanjut, strategi edukasi politik yang efektif perlu memperhatikan konteks lokalitas dan latar belakang sosial-budaya pemilih pemula. Di beberapa daerah, pendekatan berbasis komunitas dan nilai-nilai lokal terbukti lebih efektif dalam menanamkan kesadaran politik, karena lebih mudah diterima dan dipahami oleh masyarakat. Oleh karena itu, fleksibilitas metode, pelibatan tokoh masyarakat, dan pemanfaatan bahasa lokal dapat meningkatkan keberhasilan edukasi. Selain itu, perlu adanya monitoring dan evaluasi berkelanjutan terhadap pelaksanaan

program edukasi, guna memastikan bahwa materi yang disampaikan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan situasi politik terkini.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dilakukan mengenai peran, strategi edukasi, serta efektivitas pelaksanaan tugas Bawaslu dalam Pilkada Serentak Tahun 2024, dapat disimpulkan bahwa Bawaslu memainkan peran yang sangat penting dalam memastikan penyelenggaraan pemilu berjalan secara demokratis, jujur, dan adil. Peran Bawaslu tidak hanya terbatas pada pengawasan administratif dan teknis, tetapi juga bertransformasi menjadi agen perubahan demokrasi melalui pendidikan politik dan pelibatan masyarakat secara aktif, khususnya pemilih pemula. Bawaslu menunjukkan komitmen untuk meningkatkan kualitas demokrasi elektoral di Indonesia melalui pendekatan yang lebih partisipatif, transparan, dan adaptif terhadap perkembangan zaman.

Strategi edukasi politik yang dilakukan Bawaslu terhadap pemilih pemula menunjukkan arah yang positif, di mana pendekatan yang digunakan mencerminkan kebutuhan dan karakteristik generasi muda saat ini. Penggunaan platform digital, pelatihan interaktif, dan kolaborasi dengan institusi pendidikan menjadi upaya yang relevan dalam meningkatkan literasi politik generasi muda. Meski demikian, strategi ini masih menghadapi tantangan dalam hal jangkauan wilayah, keterbatasan sumber daya, dan kurangnya monitoring serta evaluasi yang berkelanjutan.

Secara keseluruhan, pelaksanaan edukasi dan pengawasan oleh Bawaslu sudah berjalan dengan baik meskipun belum sepenuhnya optimal. Evaluasi secara menyeluruh dan penguatan dalam aspek kelembagaan, SDM, serta jejaring sosial-politik perlu menjadi perhatian dalam upaya peningkatan kinerja Bawaslu di masa mendatang.

SARAN

Dari hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan yang diperoleh, maka saran yang diberikan adalah sebagai berikut.

1. Penguatan Strategi Edukasi Politik Bawaslu perlu memperluas cakupan edukasi politik dengan menjangkau lebih banyak sekolah, madrasah, dan komunitas pemuda. Penyusunan materi edukasi juga perlu dikontekstualisasikan sesuai budaya lokal dan bahasa yang mudah dipahami oleh pemilih pemula.
2. Pemanfaatan Teknologi secara Maksimal Optimalisasi penggunaan teknologi informasi seperti aplikasi pelaporan, media sosial edukatif, dan sistem informasi pengawasan berbasis digital harus terus dikembangkan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi kerja Bawaslu.
3. Peningkatan Kapasitas Pengawas dan Sumber Daya Diperlukan pelatihan intensif dan berkelanjutan bagi seluruh jajaran pengawas pemilu, baik di tingkat pusat maupun daerah, agar memiliki kompetensi dan integritas tinggi dalam menjalankan tugas pengawasan.
4. Penguatan Kolaborasi dengan Stakeholder Bawaslu perlu menjalin kerja sama yang lebih erat dengan pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil, media, dan tokoh masyarakat dalam rangka mendukung pengawasan partisipatif dan

pelaksanaan edukasi yang menyentuh seluruh lapisan masyarakat.

5. Monitoring dan Evaluasi Berkelanjutan Program edukasi dan pengawasan yang telah dijalankan perlu terus dimonitor dan dievaluasi secara sistematis agar efektivitas program dapat terus ditingkatkan serta mampu beradaptasi dengan dinamika sosial dan politik yang berkembang.

Dengan memperhatikan hal-hal tersebut, diharapkan Bawaslu dapat semakin memperkuat peran dan fungsinya dalam mengawal proses demokrasi yang inklusif, adil, dan bermartabat pada pemilu-pemilu mendatang, termasuk dalam Pilkada Serentak selanjutnya.

Yusuf, M. (2014). "Peran dan Fungsi Pemerintahan dalam Pemberdayaan Masyarakat." *Jurnal Ilmu Pemerintahan Humaniora*, Vol. 12(1).

Daftar Pustaka

Ausath, Jidan Aflahul. 2024. "Strategi Komunikasi Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta (KPU DIY) Dalam Meningkatkan Pemilih Pemula Gen Z Pada Pemilu 2024."

Bawaslu kota Bengkulu <https://ppid-bengkulukota.bawaslu.go.id/>

Coombs, P. H., & Ahmed, M. (1974). *Attacking Rural Poverty: How Non-formal Education Can Help*. Johns Hopkins University Press.

Kpu kota Bengkulu
https://l.wl.co/l/?u=https%3A%2F%2Fkpuabengkulu.kpu.go.id%2F&e=AT3xUv59j2alw1JAJANvABOskFno7uuTgE3pWaVpEGXSurehQA0nKHb_u_eb7y7nwraz4zpbbIghzdoMaSCjPcA9X50YHiGDfLRXzuKnkBMrxwvYMyNg

Sugiyono, D. 2018. "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D/Sugiyono." Bandung: Alfabeta 15(2010).